



**Politik Identitas Agama
(Studi kasus politisasi agama pada pemilihan Bupati Morotai 2011)**

Sukri Ali

Fakultas Ilmu Politik Universitas Pasifik Morotai

Email: sukriali88@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 31 Desember 2019

Direvisi: 15 Januari 2020

Dipublikasikan: 24 Januari 2020

e-ISSN: 2089-5364

p-ISSN: 2622-8327

DOI: 10.5281/zenodo.3626733

Abstract:

Issue of religion or religious politicization use in *Morotai* from the perspective of the reasonable circumstantial performed by elite politics, because of religious politicization issues on *Morotai* elections seen can destroy the presence voters in determining political options in accordance with prospective with the candidate in the same religious and ideological. Construction of religious-based identity politics issues considered may have benefits and a chance to win the election in the electoral District of *Morotai* Island. While aspects of interactional and communication can be concluded, that the political message blend religion and patterns of communication that uses religion as a source of the identity of the candidates can make the candidate build of misunderstanding with voters. In addition, religious politicization issues in the elections, it can be concluded that the *Morotai* candidates or young candidates in conducting socialization with voters feeling they in the same faith and religion. This situation is reinforced by the pattern of public relations of *Morotai* which still are paternalistic. The pattern of these relationships increasingly thick supported by a majority of the voters' education level is still low and living in the village-rural. The result of the pattern of public relations as it was then the community that chooses the Regent and Vice Regent of emotional closeness will be up to voters with candidates. Whereas the community is needed in determining political rights in choosing the leader not because of emotional closeness or with prospective partners, but to choose the leader who has the vision, as well as a good program. In this journal, using writing research, because we use this method according to the author more profound understanding and explaining religious politic on *Morotai*. While the theory that the authors use as a knife, the theory is analyses of religious politicization, elite theory, and elections.

Keywords: Election, elite, religious politicization.

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan reformasi adalah untuk mewujudkan suatu Indonesia yang baru, yaitu Indonesia yang lebih demokratis. Hal ini bisa dicapai dengan mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Selama ini, baik di masa Orde Baru maupun di era reformasi kedaulatan sepenuhnya berada di tangan lembaga-lembaga eksekutif, dan di tangan lembaga legislatif. Bahkan di era reformasi ini, kedaulatan seolah-olah di tangan partai politik.

Satu-satunya hak politik yang masih dimiliki rakyat adalah hak memberikan suara pada saat pemilu berlangsung. Sesudah itu semua hak politik yang dimiliki rakyat beralih kepada partai politik sehingga rakyat tidak memiliki apa-apa lagi, bahkan sudah dilupakan sama sekali. Namun pemilihan secara langsung diperlukan untuk memperkuat legitimasi, bahwa rakyat memiliki mandat dalam menentukan siapa yang mereka kehendaki untuk memimpin lembaga-lembaga politik. Oleh karena itu, melalui pemilihan langsung berarti rakyat secara langsung ikut berpartisipasi menentukan pemimpinnya sebagai wujud dari kedaulatannya sendiri.

Misalnya, pada Juni 2004, Bangsa Indonesia telah sukses melaksanakan pemilihan presiden secara langsung. Sekarang, pemilihan kepala daerah juga dilaksanakan secara langsung dengan diterbitkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai revisi UU No. 22 Tahun 1999. Dengan berlakunya undang-undang tersebut, perubahan yang signifikan yang terdapat adalah pemilihan kepala daerah secara langsung, dalam rangka mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat sesuai tuntutan reformasi serta perwujudan dari demokrasi itu sendiri.

Warga masyarakat di daerah, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga Negara Republik Indonesia secara keseluruhan, juga berhak atas kedaulatan yang merupakan hak asasi mereka, yang telah dijamin oleh konstitusi kita, yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, warga masyarakat di daerah berdasarkan kedaulatan yang mereka miliki, harus diberi kesempatan untuk ikut menentukan masa depan daerahnya masing-masing, antara lain dengan memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung sebagai tuntutan demokrasi itu sendiri.

Secara sederhana Joseph Schumpeter memaknai demokrasi sebagai sebuah sistem politik yang berupaya untuk menghantarkan keputusan-keputusan politik secara partisipatif oleh individu-individu yang mendapatkan kekuasaan melalui persaingan yang adil dalam memperebutkan suara rakyat (Larry, 2003). Oleh karena itu, demokrasi ditingkat lokal akan mendapatkan kekuatannya apabila seleksi para pemimpin lokal dan pertarungan berjalan dengan kompetisi yang adil. Lain dari pada itu, ada beberapa catatan dalam rangka mewujudkan penguatan hingga pemberdayaan demokrasi di tingkat lokal dalam proses pemilihan maupun rekrutmen para wakil rakyat mendapat mandat politik dari warga masyarakatnya.

Pilkada langsung merupakan salah satu langkah maju dalam mewujudkan demokratisasi ditingkat lokal. Bahkan Top O'Neill (2005) menyatakan '*all politics is local*' yang dapat dimaknai sebagai demokrasi di tingkat nasional akan tumbuh berkembang dengan mapan dan dewasa apabila pada tingkat lokal nilai-nilai demokrasi berakar dengan baik terlebih dahulu. Maksudnya demokrasi ditingkat nasional akan bergerak kearah yang lebih baik apabila tatanan,

instrumen, dan konfigurasi kearifan serta kesantunan politik lokal lebih dulu terbentuk. Ini artinya kebangkitan demokrasi politik di Indonesia secara ideal dan aktual diawali dengan pilkada langsung sebagai upaya dalam rangka membangun pondasi demokrasi di Indonesia.

Pemekaran kabupaten pulau Morotai menjadi otonomi daerah di provinsi Maluku Utara tidak lepas dari kondisi sosio-ekonomi yang di hadapi masyarakat pulau Morotai. Di bawa naungan kabupaten Halmahera Utara, Morotai sering di anak tirikan oleh kabupaten induknya sendiri. Setiap kebijakan tentang pembangunan tidak dirasakan secara signifikan oleh masyarakat pulau Morotai (sebelum pemekaran), pembangunan hanya dipusatkan di wilaya perkotaan tobelo (Ibu kota), sedangkan Morotai sendiri terpisah dari pulau Halmahera. Terisolasi dari kebijakan kabupaten induk, serta termarginalisasi dari pembangunan, membuat elite dan masyarakat sadar. Untuk keluar dari ketidakadilan pembangunan Morotai harus melepaskan diri dari Halmahera Utara dan harus menjadi daerah otonomi baru. Maka pada tahun 2006 isu pemekaran Morotai didengungkan oleh elite dan masyarakat pulau Morotai.

Tuntutan pemekaran Morotai sebagai daerah otonom baru merupakan kritik sekaligus sikap politik masyarakat dari marginalisasi kebijakan pembangunan kabupaten induk Halmahera Utara dibawa Ir. Hein Namotemo sebagai bupati waktu itu. Harapan kesejahteraan yang tidak dipenuhi oleh kabupaten induk inilah membuat masyarakat tidak punya pilihan, selain melepaskan diri dan Morotai harus menjadi kabupaten baru. Pulau Morotai di mekarkan menjadi daerah otonom baru di Provinsi Maluku Utara, melalui UU No. 53 Tahun 2008 sebagai sarat legalitas formal, maka

Pulau Morotai pun berubah status menjadi kabupaten definitif dan terlepas dari kabupaten induk Halmahera Utara. Sehingga Kabupaten Pulau Morotai yang baru lahir ini berhak menjalankan roda pemerintahannya sesuai dengan peraturan per-undang-undang yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Secara umum, tujuan dari otonomi daerah adalah mempermudah pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan menciptakan ketertiban ditengah masyarakat. Otonomi daerah juga memberikan peluang yang besar kepada masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam setiap kebijakan politik yang diambil oleh pemerintah, selain itu masyarakat di daerah juga ikut menentukan kepemimpinan daerahnya sebagaimana amanat UU No. 32 Tahun 2004

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, dimana Undang-Undang ini terdiri dari 240 Pasal tersebut, 63 Pasal diantaranya mengatur tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung, yaitu Pasal 56 sampai dengan Pasal 119. Dengan dimekarkannya Kabupaten Pulau Morotai, maka Kabupaten yang baru inipun melaksanakan suksesi perdana pemilihan kepala daerah definitif guna mencari kepemimpinan daerah serta mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat di daerah. Sehingga rakyat Morotai pun ikut terlibat dalam menentukan arah daerah kedepan serta kepemimpinan daerahnya.

Realitas politik pada saat suksesi pemilihan umum kepala daerah di Pulau Morotai, ternyata berbeda dengan realitas politik dengan Kabupaten-Kota lain yang ada di Maluku Utara. Hal yang menarik

menjelang prosesi pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di Pulau Morotai adalah persoalan permainan isu politik, karena isu adalah bagian dari cara dalam mempengaruhi preferensi pemilih. Dalam politik, isu merupakan kebutuhan yang sangat penting, sebab siapa yang menguasai isu dan opini yang positif, maka sudah dipastikan akan mendapat manfaat elektoral yang tinggi. Elite politik di Morotai menjaring isu yang sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat yang ada. Akan tetapi, isu yang hangat dan mencuat kepermukaan adalah persoalan identitas atau latar belakang agama bagi elite politik yang akan bertarung dalam suksesi. Agama diperlakukan sebagai sumber identitas diri yang paling dalam. Sedangkan identitas diri merupakan basis utama bagi politik. Maka, masuk akal jika isu agama menjadi bagian terpenting dari strategi politik.

Ternyata realitas politik tersebut menimbulkan resistensi politik tersendiri, serta semakin memanas keadaan politik pada saat pesta demokrasi tersebut, karena para elite politik berlomba-lomba memainkan isu politik yang berbeda-beda untuk mendapatkan kursi nomor satu di kabupaten pulau Morotai. Isu yang sangat memiliki daya tariksaat itu adalah isu agama yang menjadi predikat bagi elite politik atau agama yang dipeluknya (identitas). Agama seakan-akan dipolitisasi dan dijadikan sebagai alat untuk melegitimasi pencapaian kekuasaan, karena mayoritas masyarakat Morotai memeluk dua agama besar yaitu Islam dan Kristen.

Dinamika ini tercermin di tengah masyarakat Morotai, dan isu agama sengaja diproduksi terus menerus oleh kandidat yang mewakili kedua agama tersebut, pada saat yang sama masyarakat Morotai yang masih tergolong pemilih tradisional dengan muda percaya pada isu yang dimainkan

elite. Secara sosiologis masyarakat Morotai terdiri dari banyak etnis dan agama yang tumbuh subur di pulau terluar Indonesia ini. Misalnya, jumlah penduduk masyarakat Morotai pada Agustus 2009 sebanyak 58.720 (Lima puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh), yaitu jumlah penduduk agama Islam sebanyak 31.477 (Tiga puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh tujuh), jumlah penduduk agama Kristen Protestan adalah sebanyak 24.418 (Dua puluh empat ribu empat ratus delapan belas), dan jumlah penduduk Kristen katolik 2.825 (Dua ribu delapan ratus dua puluh lima). Sedangkan jumlah pemilih masyarakat Morotai pada pilkada 2011 adalah sebanyak 38.099 (Tiga puluh delapan ribu sembilan puluh sembilan). Perbandingan jumlah penduduk yang hampir berimbang antara masyarakat yang memeluk agama Islam dan agama Kristen memiliki pengaruh tersendiri terhadap dinamika politik di Morotai, karena elite politik yang merepresentasi kedua agama tersebut memanfaatkan basis agama untuk mencapai tujuan politiknya. Misalnya, dengan menjual identitas keagamaan ketengah-tengah masyarakat Morotai pada saat pesta demokrasi tersebut.

Agama dipandang memiliki magnet yang dapat mengikat individu dalam suatu ikatan kebersamaan yang kuat, sehingga agama menjadi komoditas politik yang kental bagi beberapa kelompok individu. Identitas agama sebagai kekuatan politik dan alat legitimasi atas dasar kepentingan para elite. Padahal kita berharap isu-isu yang dapat mengancam pluralitas jangan dijadikan sebagai alat politik. Namun dalam pertarungan politik keadaan berkata lain, karena untuk mencapai kekuasaan semua cara dapat dilakukan, walaupun itu bertentangan dengan semangat demokrasi.

Dari dinamika politik yang berkembang di kabupaten Pulau Morotai tersebut di atas, penulis hendak

menelaah secara mendalam praktek politisasi agama yang dilakukan elite politik di Morotai. artikel ini ditujukan untuk menjawab permasalahan yang menarik, yaitu politisasi agama oleh elite politik pada saat pilkada kabupaten pulau Morotai 2011. Untuk menjawab penelitian ini maka perlu menjawab pertanyaan di bawah ini :

1. *Mengapa terjadi penggunaan isu agama dalam pilkada kabupaten pulau Morotai 2011 ?*

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif analisis yang biasa disebut juga penelitian taksonomik (*taxonomic research*) dimaksud untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Jenis penelitian ini tidak sampai mempersoalkan jalinan hubungan antar variabel yang ada. Pertama, Bogdan dan Taylor, mendefinisikan *metodologi kualitatif* sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandang sebagai bagian dari sesuatu keutuhan (Maleong, 1989). Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tipe kualitatif. Data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer terdiri dari para informan yang kredibel berupa kandidat, tim sukses, para akademisi, tokoh agama, tokoh pemuda dan masyarakat yang terlibat langsung saat pilkada kabupaten pulau Morotai 2011. Sedangkan data

sekunder merupakan data pendukung dari data primer yang diperoleh dari sumber lainnya terutama dari buku-buku, naskah-naskah, dokumen-dokumen, atau kepustakaan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Sosio – Politik dan Penggunaan Isu Agama Pada Pilkada Morotai

Secara sederhana menguatnya politik identitas, baik etnis, agama, suku, dan jender disebabkan karena kondisi sosial politik yang menyertainya. Misalnya. Salah satu riset disertasi yang dilakukan oleh Sri Astuti Buchari (2014) tentang kebangkitan suku Dayak di Kalimantan, secara umum karena diskriminasi secara politik, mulai dari jaman penjajahan kolonial Belanda maupun jaman kesultanan, etnis Dayak dianggap sebagai *alun* atau kuli. Begitu juga di masa Orde Baru, etnis dayak tidak banyak mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam jabatan – jabatan pemerintahan serta ruang publik lainnya. Ketika dinamika politik bangsa ini bergeser dari sistem sentralistik ke desentralisasi dengan perangkat undang – undang yang menyertainya, UU No 22 tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah dan direvisi menjadi UU No 32 tahun 2004, telah memberikan angin segar bagi kekuatan – kekuatan politik lokal untuk meneguhkan identitas politik mereka yang selama ini direduksi perannya oleh rejim Orde Baru.

Angin segar demokrasi sebenarnya telah membuka ruang terhadap kemunculan politik identitas agama, etnis, suku, dan lain – lain. Kemunculan politik identitas biasanya berdasarkan dua hal, pertama muncul karena kondisi sosial historis, kemunculan pertama ini karena di masa

lalu komunitas agama atau etnis tertentu mengalami marginalisasi dan perlakuan yang tidak baik, sehingga melahirkan sikap psikologis akan nasib yang sama. Ketika perubahan politik, dan terjadi gelombang demokrasi, di sinilah etnis dan agama yang sebelumnya mengalami diskriminasi memunculkan dirinya sebagai kekuatan politik. Sedangkan yang kedua, kemunculan politik identitas biasanya kerana konstruksi elite yang berkepentingan. Elite yang memandang agama dan etnis memiliki nilai bergening yang kuat dalam mempengaruhi kebijakan serta dapat memobilisasi massa untuk mencapai tujuan – tujuan politik. Maka di sinilah elite mencoba memanfaatkan agama dan etnis dalam ruang politik.

Begitu juga kemunculan penggunaan isu politik agama di Morotai tidak bisa dipisahkan dari konfigurasi konflik agama yang terjadi pada bulan Desember Tahun 1999. Kejadian itu pecah di penghujung bulan suci ramadhan 1420 H, tepatnya tanggal 26 Desember 1999. Konflik agama tersebut telah merusak hubungan sosial masyarakat Maluku Utara umumnya, dan Halmahera Utara serta Morotai khususnya, baik mereka yang beragama Islam dan Kristen. Tragedi berdarah tersebut memakan biaya nyawa, sosial dan materi yang sangat mahal, karena terjadi penjarahan/pembakaran rumah ibadah, rumah warga, dan pengusiran besaran – besaran atas mereka yang takluk dalam perang. Sehingga untuk rekonsoliasi butuh waktu yang lama. Menurut Selo Soemardjan, secara sosiologis rekonsoliasi sosial membutuhkan waktu 25 hingga 50 tahun kedepan. Artinya konflik Halmahera Utara dan Morotai akan mengorbankan 1 hingga 2 generasi. Mereka yang yatim dan korban karena kekerasan ini akan menjadi *'the lost generation'*. Sungguh sebuah *'social cost'* yang terlalu mahal.

Hubungan sosial masyarakat di Kabupaten Pulau Morotai antara umat Islam dan Kristen sebagaimana amatan penulis pasca konflik hingga sekarang tidak seperti dulu lagi (sebelum konflik), walau pun ada upaya yang kuat dari berbagai pihak stakeholder untuk mencairkan suasana masa lalu. Namun masih ada rasa kekhawatiran di tengah masyarakat, kalau pun ada acara-acara seremoni yang melibatkan kedua agama tersebut, tetapi itu hanya sekedar pemandangan depan layar saja. Akan tetapi, rasa emosional masa lalu sudah menjadi laten di tengah – tengah masyarakat. Realitas sosio – politik tersebut mendapat ruang pada pemilihan perdana bupati dan wakil bupati Kabupaten Pulau Morotai 2011.

Realitas psikologis masyarakat Morotai yang masih kuat dengan sentimen keagamaan sebagaimana disampaikan oleh Bulla, bahwa yang jelas pasca rusuh membentuk sentimen ideologis yang begitu kuat, jadi bukan saja di Morotai tepi di Tobelo juga demikian, imbasnya di Morotai dengan pilkada 2011 mengencangkan isu – isu tentang agama kerana interfensi sidone dan wadah-wadah organisasi keagamaan yang begitu kuat, sehingga melahirkan polarisasi konstituen begitu efektif.

Artinya dari kutipan wawancara di atas menunjukkan, bahwa sentimen ideologis sangat berperan dalam struktur tindakan politis masyarakat Morotai, dan sentimen ideologis yang ada di tengah – tengah masyarakat coba dimanfaatkan oleh elite – elite yang berkepentingan di Morotai, melalui jaringan – jaringan keagamaan yang mereka miliki, baik ormas – ormas keagamaan dan institusi seperti sinode. Ormas – ormas dan sinode berperan penting dalam dinamika politik di Morotai, ormas keagamaan dan sinode sengaja memunculkan kembali sentimen ideologis sebagai basis politik pada pilkada Kabupaten Pulau Morotai

2011, karena isu agama dianggap sangat strategis dalam mempengaruhi konstituen.

Peran agama yang sangat strategis itulah, membuat elite politik di Morotai menjadikan identitas agama yang mereka peluk dipolitisasi demi kepentingannya. Politisasi identitas agama dipandang membawa manfaat elektoral bagi kandidat dalam memenangkan pilkada Morotai, sehingga bagi elite dan tim sukses, isu agama merupakan kebutuhan mendesak yang harus didesain, walau pun isu ini dipandang kurang etis. Namun demi alasan kekuasaan, semua hal dipertarukan. Pada konteks ini, ukuran etika dan moral bukan lagi menjadi ukuran bagi setiap tim dan elite yang berkepentingan. Hampir sulit dibantah, dinamika politik di Indonesia mulai dari suksesi pemilihan kepemimpinan nasional, sampai pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terdapat indikasi yang kuat, bahwa para elite yang berkepentingan sering menggunakan semua cara untuk mencapai kekuasaan. Artinya untuk mencapai kekuasaan politik serta mendapat legitimasi dari masyarakat semua cara bisa dipakai.

Realitas ini juga tampak pada pilkada Kabupaten Pulau Morotai, elite dan tim sukses memanfaatkan penggunaan isu agama sebagai strategi politik. Ini senada dengan yang di sampaikan oleh Koco (2019), bahwa kebutuhan mendesaian isu keagamaan merupakan bagian dari pada strategi untuk menarik atau mengambil kecenderungan politik karena memang salah satu kecenderungan yang mencuat di Morotai adalah isu ideologis, penggunaan isu agama juga dipetakan sesuai dengan kondisi desa dan masyarakat, dan waktu itu Anghani Tanjung adalah calon tunggal dari agama Kristen, sehingga menjadi kebutuhan mendesain, semangat etnis keagamaan itu dipakai.

Dari fakta di atas menunjukkan bahwa elite dan tim sukses mendesain isu agama merupakan kebutuhan, kerena realitas sosiologis masyarakat Morotai menunjukkan demikian. Secara teoritis elite dan tim sukses di Morotai menggunakan cara – cara yang tidak jauh sebagaimana pemikiran Machiavelli. Menurut Machiavelli (1987), orang menjadi penguasa harus menggunakan cara jahat dan keji. Baginya politik dan moral adalah dua bidang yang terpisah. Dalam urusan politik, tidak ada perbincangan masalah moral, hanya satu hal yang penting ialah bagaimana meraih sukses dengan memegang kekuasaan. Kaidah etika politik Machiavelli adalah tujuan berpolitik dengan memperkuat dan memperluas kekuasaan. Di antara sekian cara Machiavellian, politisasi agama di Morotai adalah salah satu cara dari sekian cara yang dipakai menjelang pesta demokrasi.

Kebangkitnya politik identitas berbasis agama di Indonesia dan Morotai tidak lepas dari dinamika demokrasi. Reformasi politik dan berlakunya otonomisasi merupakan awal bagi lahirnya kembali sebuah masyarakat dengan segala dinamikanya. Bangkitnya politik agama merupakan gejala demokrasi, demokrasi lokal dengan regulasi yang menyertainya memberikan ruang kebebasan bagi semua kekuatan politik di tingkat lokal untuk bertarung memperebutkan kekuasaan.

Perebutan kekuasaan di Morotai juga diwarnai dengan konflik kepentingan yang semakin meruncing dikalangan elite, bahkan tidak sedikit kampanye berbaur saling menyerang di antara sesama elite, hal – hal yang bersifat pribadi pun ramai bergema dihadapan mimbar kampanye. Ituah politik, penuh dengan siasat, intrik, dan manipulatif.

Cara lain dari perebutan kekuasaan yang penuh siasat,

manipulatif, dan intrik di Morotai adalah penggunaan isu identitas agama. Penggunaan isu agama oleh calon kandidat serta tim sukses dalam pilkada Kabupaten Pulau Morotai tidak lepas dari kondisi sosiologis pemilih. Artinya, pemilih di Morotai masih dalam kategori pemilih tradisional, karena tingkat pendidikan pemilih yang masih rendah dan pemahaman politik yang minim, sehingga dalam menentukan pilihan politik jarang menggunakan hati nuraninya. Realitas partisipasi politik masyarakat Morotai yang masih tradisional inilah dimanfaatkan oleh elite dengan mendesain isu agama. Sebagaimana disampaikan oleh Ardi. Bagi beliau, banyak pemilih yang belum memiliki pengetahuan yang relatif memadai untuk kepentingan memilih calon dan ketika ini didekatkan dengan tren isu agama, pengaruhnya sangat signifikan, sehingga pemilih tanpa malu – malu menentukan pilihan politiknya kepada calon atau kandidat yang se – ideologis.

Jika dianalisis, latar belakang pemilih yang dalam kategori masih tradisional dan minimnya pemahaman akan pentingnya partisipasi politik inilah, coba dimanfaatkan oleh elite dan tim sukses untuk menyampaikan pesan politik berbasis agama. Pesan politik berbasis agama dinilai dapat mempengaruhi masyarakat dalam menentukan hak politiknya. Artinya masyarakat Morotai dalam memilih kandidat masih melihat ikatan emosional dan kedekatan ideologis keagamaan. Dalam hubungan ini dapat dikatakan dalam hampir setiap kegiatan partisipasi terdapat unsur manipulasi oleh elite. Manipulasi terhadap simbol – simbol keagamaan, berupa identitas yang melekat pada calon bahwa dia berasal dari agama ini dan agama itu. Identitas keagamaan dianggap memiliki nilai tawar yang signifikan jika dikomunikasikan kepada pemilih. Pada saat yang sama, tingkat kecerdasan

pemilih yang masih rendah mengakibatkan polarisasi di kalangan masyarakat, apakah memilih kerana visi – misi atau karena kesamaan identitas. Dari penjelasan tersebut, jelaslah bahwa tingkat rasionalitas masyarakat dalam memilih pemimpin erat sekali kaitannya dengan tingkat kesadaran politik.

Tren manipulasi identitas keagamaan yang terjadi pada pilkada Kabupaten Pulau Morotai merupakan setingan elite yang berkepentingan, hal ini disebabkan kerana identitas keagamaan memiliki posisi tawar yang signifikan, jika tren identitas keagamaan dapat dikomunikasikan ke masyarakat. Sehingga untuk mendapat simpati dari masyarakat yang seideologis, elite di Morotai mencoba menkonstruksi identitas agama sebagai bagian dari strategi politik, karena salah satu faktor yang menentukan pemilih dalam memilih pemimpin tidak lepas dari identitas keagamaan yang dimiliki sang calon.

Persoalan kesamaan agama masih menjadi ukuran bagi sebagian pemilih dalam menentukan hak politiknya, sehingga para elite dan tim sukses mendekati diri melalui identitas agama yang melekat pada diri mereka. Sedangkan identitas secara sosiologis politik memiliki manfaat politik yang kuat jika dimanipulasi menjadi isu dan strategi politik.

Bagi Agi, penggunaan isu agama dalam pilkada Morotai dikarenakan agama memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap pengikutnya, agama dapat menjadi perekat bagi umatnya, agama juga bisa memainkan emosi pengikutnya. Elite dan tim sukses di Morotai menyadari peran yang dimiliki oleh agama. Sehingga elite dan tim sukses di Morotai menggunakan isu agama merupakan strategi politik untuk mendekati pemilih. Agama dipandang mempermudah para elite dan tim

sukses dalam berkomunikasi dengan pemilih, apalagi elite dan tim sukses yang merasa seiman dengan konstituen. Maka agama adalah salah satu cara yang efektif yang dapat mempengaruhi pemilih dalam menentukan hak politiknya.

Dari pernyataan singkat di atas, ternyata agama memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi konstituen. Agama dengan peran doktriner dan pesan moral yang melekat dipandang sebagai senjata yang ampuh oleh para elite dan tim sukses dalam melakukan pendekatan dengan pemilih. Elite politik dan tim sukses di Morotai sadar bahwa agama mempunyai daya magnet yang kuat terhadap pengikut, sehingga jika isu politik agama atau politisasi identitas keagamaan dianggap menjadi kebutuhan pemilih, kerana kekuatan agama dalam mengikat individu dalam suatu ikatan kebersamaan sangat kuat. Misalnya agama menjadi komoditi politik yang kuat bagi beberapa kelompok individu. Partai – partai yang mendasarkan asasnya pada agama tertentu dalam suatu negara merupakan bukti bahwa keterlibatan agama cukup kuat dalam politik.

Identitas agama dipandang sebagai kekuatan politik atau alat legitimasi atas dasar normativitas doktrinal transenden atau Ilahi. Pencitraan Ilahi terhadap politik agama menjadi simbolisasi praktik – praktik politik, struktur, dan implementasinya. Misalnya, Gereja Katolik Roma merupakan lembaga politik yang besar dan kuat. Peranan politik Gereja ini dalam beberapa negara pada umumnya telah dilakukan dengan pertimbangan kemanusiaan yang cermat dan dengan dukungan kewibawaan yang kuat dalam kebanyakan urusan – urusan umum (Abdillah, 2002).

Salah satu ciri penting dari dinamika politik modern adalah tumbuhnya pengakuan terhadap

pengaruh perbedaan – perbedaan kebudayaan dalam masyarakat dan sering digambarkan sebagai politik identitas, atau politik perbedaan (Heywood, 2014). Dalam usaha untuk meraih kembali sebuah rasa identitas yang murni atau outentik, politik identitas meng – ekspresikan ketidaksetujuan terhadap marginalisasi dan ketidakberuntungan dan berlaku sebagai salah satu sumber pembebasan. Inilah yang memberi pada politik identitas karakter bertarungnya yang khas dan melengkapinya dengan kekuatan psiko – emosional.

Kekuatan emosional yang tumbuh di tengah – tengah masyarakat Morotai akibat dari konflik agama masa lalu menjadi kekuatan politik bagi sebagian kelompok yang berkepentingan menjadi orang nomor satu di pulau terluar Indonesia itu. Walau pun, beberapa kandidat calon bupati di Morotai saling berpasang – pasangan merepresentasi keterwakilan agama baik Islam dan Kristen. Namun ketika ada sosialisasi terpisah antara calon bupati dan wakil bupati di komunitas masing – masing, para calon mendekati diri pada pemilih dengan identitas keagamaan yang mereka peluk. Seperti di benarkan oleh Sambiki, bagi beliau, salah satu kandidat wakil bupati pandeta Demianus Ice, ketika melakukan sosialisasi di komunitas – komunitas Kristen, dia bilang bahwa saya direkomendasi oleh sinode, selain memberikan rekomendasi dukungan kepada saya, mereka juga siap memenangkan kami. Oleh karena itu, saya harap ngoni dukung pa saya.

Pandeta Demianus Ice merupakan calon wakil bupati dari Hi. Arsad Sardan, dan beliau adalah wakil sidone Kabupaten Pulau Morota. Dari cara dan pola komunikasi politik yang dilakukan oleh Pandeta Demianus Ice menunjukkan penggunaan instrumen sinode sebagai identitas politik dalam

mempengaruhi pemilih sangat nyata. Identitas sinode sebagai organisasi keagamaan dimanfaatkan demi kepentingan politik. Secara sederhana politisasi organisasi keagamaan merupakan strategi atau cara dalam meyakinkan pemilih. Sebab organisasi keagamaan seperti sinode memiliki pengikut dan pengaruh yang kuat untuk memobilisasi masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya.

Penegasan identitas keagamaan yang dikonstruksi lewat pesan komunikasi politik merupakan sebuah formulasi politik elite untuk membangun kesepahaman persepsi dengan masyarakat. Para elite sadar bahwa masyarakat mempunyai identitasnya sendiri diluar dimensi politis. Dan dengan identitas itu, yang berarti keterkaitan mereka pada kelompok sosial tertentu, masyarakat mempunyai tujuan, bahkan (bisa dikatakan) kemauan diluar struktur politik. Itu berarti bahwa dalam konteks – konteks tertentu pengekspresian identitas diluar struktur politik adalah sebuah keharusan, khususnya dalam usaha mewujudkan tujuan seseorang sebagai bagian dari suatu kelompok sosial tertentu atau tujuan bersama dari kelompok yang bersangkutan.

Menariknya, pengekspresian identitas diluar struktur politik tersebut bisa saja digunakan untuk menandingi atau bahkan memanipulasi struktur politik. Hal terakhir ini, misalnya berkaitan dengan pendefinisian warga negara atau warga lokal dengan menggunakan kriteria agama, etnis, dan suku.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, menurut analisis penulis bahwa identitas agama yang dikonstruksi lewat pesan komunikasi politik pada saat pemilihan bupati dan wakil bupati adalah dinamika sosiologis yang terbentuk lewat kesamaan budaya dan sistem nilai antar anggota masyarakat Morotai yang terjadi melalui proses

internalisasi yang begitu intens sehingga menjadi patokan normalitas atas segala sesuatu yang dilakukan atau diinginkan oleh masyarakat pula di Morotai.

Penegasan identitas melalui pesan agama menjadi tren komunikasi politik elite untuk mendorong kepentingan mereka pada momentum politik pilkada dan/atau ruang ke – birokrasian (dalam hal ini pengisian jabatan pejabat bupati Morotai). Mengingat banyaknya varian agama, etnis/suku yang mewarnai dinamika sosialp – olitik kehidupan masyarakat Morotai.

Penegasan identitas berbasis agama dalam dinamika politik Morotai merupakan upaya elite dalam memperebutkan pengaruh dan simpati pada basis – basis pemilih yang se – ideologis. Lebih jauh lagi, bahwa pengaruh agama dalam kekuasaan politik bukan hal yang baru. Sejarah telah membuktikan pada abad pertengahan yang oleh banyak ilmuwan menyebut abad kegelapan, karena abad kegelapan ditandai dengan kekuasaan Gereja yang begitu kuat dalam mempengaruhi sendi – sendi kehidupan di Eropa. Pada masa ini agama berkembang dan mempengaruhi hampir seluruh aktivitas manusia, sampai urusan pemerintahan.

Dinamika politik Indonesia memang tidak lazim lagi, bagi para elite politik menggunakan simbol – simbol keagamaan dan memanipulasi identitas sebagai alat politik. Apalagi demokrasi langsung memberikan ruang kepada setiap elite untuk bertarung memperebutkan suara rakyat sebagai sumber legitimasi politik. Ini sejalan dengan konsep demokrasi elektoral Schumpeter (2013), demokrasi baginya adalah perterungan kelembagaan untuk sampai pada keputusan – keputusan politik dan individu – individu mendapatkan kekuasaan untuk memutuskan dengan suatu perjuangan

kompetitif atas suara rakyat. Secara sederhana, dalam perjuangan kompetitif untuk mendapatkan legitimasi politik dari rakyat, tentunya banyak cara dan strategi yang digunakan dalam rangka meyakinkan publik pemilih, baik cara – cara yang elegan maupun cara – cara manipulasi. Cara – cara ini juga dipakai dalam banyak perhelatan demokrasi langsung di tingkat lokal. Pilkada langsung merupakan medan pertempuran para elite lokal bertarung secara kompetitif mendapatkan suara rakyat.

Realitas politik pada saat pilkada Morotai secara garis besar menunjukkan bahwa identitas agama yang dipeluk sang calon atau wakil calon di manfaatkan sebagai alat komoditi politik. Identitas keagamaan dipandang bermanfaat jika isu ini didekatkan pada masyarakat, karena identitas dipandang memiliki nilai tawar elektoral yang tinggi. Identitas keagamaan dapat mempermudah para calon bupati dan wakil bupati dalam melakukan komunikasi politik serta menyampaikan pesan – pesan dengan kosntituen. Selain itu, identitas keagamaan juga mempermudah para calon bupati dan wakil bupati dalam melakukan sosialisasi politik serta isu agama dapat mempengaruhi preferensi pemilih untuk menentukan hak politiknya pada saat pilkada.

Analisis Singkat Terhadap Pengaruh Politisasi Agama pada Pilkada Morotai

Pengaruh dan dukungan pemilih

- -Pemilih melakukan identifikasi terhadap calon bupati/ wakil bupati
- -Dukungan p pemilih di Morotai menjadi terkonsolidasi lewat pesan isu agama
- -Ada harapan untuk memilih calon yang seiman dan seideologis
- -Dukungan politik pemilih terkonsentrasi pada dua kandidat, Rusli Sibua dari agama Islam, dan Anghani Tanjung sebagai calon tunggal dari agama Kristen

KESIMPULAN

Menguatnya penggunaan isu agama pada pilkada Kabupaten Pulau Morotai 2011 lalu adalah fakta sosiologis yang tidak bisa dihindarkan. Kemunculannya pun tidak lepas dari kondisi faktual dinamika sosial politik masyarakat Morotai yang masih kental dengan sentimen agama atau ideologis akibat dari konflik masa lalu, kondisi sosio-politik ini dimanfaatkan oleh elite dan tim sukses untuk mendapat dukungan dan simpati pemilih.

Penggunaan isu agama atau politisasi agama di Morotai dari perspektif situasional merupakan hal yang wajar dilakukan oleh elite politik, karena penggunaan isu agama pada pilkada Kabupaten Pulau Morotai dipandang dapat merubah preferensi pemilih dalam menentukan pilihan politik sesuai dengan calon yang se-agama dan se-ideologis. Konstruksi isu politik identitas berbasis agama dianggap dapat memiliki manfaat elektoral dan berpotensi memenangkan pilkada Kabupaten Pulau Morotai. Sedangkan dari aspek interaksional dan komunikasi dapat disimpulkan, bahwa pesan politik yang berbaur agama serta pola-pola komunikasi yang menggunakan agama sebagai sumber identitas sang kandidat dapat mempermudah para calon membangun kesepahaman dengan pemilih. Selain itu, penggunaan isu agama dalam pilkada Morotai dapat disimpulkan, bahwa para calon atau kandidat muda dalam melakukan sosialisasi dengan pemilih karena merasa se-iman dan se-agama.

Realitas masyarakat Morotai yang masih minim pengetahuan dan tingkat pendidikan yang masih rendah, yang membuat mereka muda terpengaruh dengan isu-su dan seting kepentingan elite, sehingga para elite memandang politisasi agama memiliki nilai tawar yang signifikan, jika isu ini didekatkan kepada pemilih. Lebih jauh

lagi, bahwa politisasi agama di Morotai dalam wujud penggunaan identitas agama sang calon sebagai komoditi politik untuk didekatkan pemilih.

Sedangkan sisi lain, bisa disimpulkan politisasi agama pada saat pilkada langsung pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Pulau Morotai telah menimbulkan kecenderungan atau semacam politik aliran ditengah-tengah masyarakat. Misalnya terdapat keberpihakan pemilih dalam menentukan hak politiknya cenderung memilih calon kandidat yang seagama, se-iman, dan sealiran, menimbulkan kekhawatiran psikologis akan konflik masa lalu terulang kembali, menimbulkan rasa tidak saling percaya antar umat beragama, serta merusak hubungan sosial masyarakat yang sementara dalam kondisi transisis.

Sedangkan dari sisi konseptual, politisasi agama merupakan upaya pendidikan politik yang kurang baik, masyarakat diseguih dengan isu-isu pemanfaatan identitas keagamaan sang calon, sebagai bahan komunikasi politik. Pada hal yang kita harapkan, para elite dan calon harus mendekati pemilih dengan isu-isu programatis serta gagasan untuk membengun morotai kedepan yang maju. Politisasi agama juga sebenarnya merusak nilai-nilai demokrasi, karena politisasi agama adalah model politik dikotomik antara elit yang berbeda agama, selain dikotomik, politisasi agama juga menimbulkan polarisasi ditengah masyarakat dengan mulculnya perkubuan-perkubuan yang cenderung melahirkan konflik.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah S, Ubed. *Politik Identitas Etnis, Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*. Magelang, Yayasan INDONESIA TERATA, 2002.
Ahmad, Hi Kasman, dan Herman Usman. *Damai Yang*

Terkoyak, Catatan Kelam dari Bumi Halmahera. Dikutip dari tulisan Syaiful Bahri Ruray, *Tragedi Halmahera, Antara Bosnia dan Popilo*. diterbitkan atas kerjasama: Kelompok Studi Podium, LPAM Pemuda Muhammadiyah, Madani Pres, 2000.

Agustino, Leo. *Politik & Otonomi Daerah*. Jakarta, Untirta Press, 2005.

Buchari, Sri Astuti. *Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas*. Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

Diamond, Larry. *Developing Democracy, Toward Consolidation*. Yogyakarta, diterjemakan oleh TimIRE Yogyakarta, 2003.

Heywood, Andrew. *Politik*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, edisi ke 4, 2014.

Machiavelli, Nicola. *Sang Penguasa*. Jakarta, PT Gramedia, 1987.

Maleong, Lexi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya. 1989.

Romli, Lili. *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007.

Schumpeter, Joseph A. *Capitalism, Socialism, & Democracy*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013.

Sumber lain:

Sumber: Tulisan Abdul Wahid, dengan judul. *Stop Politisasi Agama*. Opini, Jumat, 7 Agustus 2015

Sumber: Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Sumber: Dikutip dari, *Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pulau Morotai Propinsi Maluku Utara*. Bogor. 2010.

Sumber: KPUD Kabupaten Pulau Morota 2011..

Sumber. <http://id.wikipedia.org>

Sumber: Wawancara Narasumber.